



**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 5/KU.03/JI-10/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/KI/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480AG/AG5/2024 tanggal 19 Oktober 2024 Tentang penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2024;
12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686158/2026 Revisi ke - 01, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : PRAJNA EKA PUSPITASARI. SE
NIP : 19780909 200801 2 023
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/ III D

KEDUA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 07 Januari 2026
Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang,



PRAJNA EKA PUSPITASARI , SE